

## ABSTRAK

### PERAN *CYBER CRIME* DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Hermansyah \*

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\*

Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH \*\*

Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi *online* tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online*, bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi *online*, bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan.

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi *online* yang telah dilakukan Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Poldasu masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum oleh unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda yaitu sanksi pidana terhadap judi *online* berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi *Online*.**

---

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE CYBER CRIME DITRESKRIMSUS OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE IN ENFORCING THE LAW AGAINST ONLINE GAMBLING CRIMES (Study at the North Sumatra Regional Police)**

**Hermansyah \***

**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***

**Dr. Panca Sarjana Putra,SH.MH \*\***

*Gambling via the internet (internet gambling) usually occurs due to placing bets on sports or casino activities via the internet. Online gambling perpetrators can be punished based on Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The formulation of the problem in the research in this thesis is how the law regulates the crime of online gambling, what are the law enforcement efforts carried out by the North Sumatra Regional Police Ditreskrimsus Cyber Crime unit against perpetrators of online gambling crimes, what are the obstacles and law enforcement efforts by the North Sumatra Regional Police Ditreskrimsus Cyber Crime unit to overcome these obstacles.*

*The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials and field research.*

*Regulation of criminal acts of online gambling in Indonesia is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Law enforcement efforts carried out by the North Sumatra Police Ditreskrimsus Cyber Crime Unit against perpetrators of online gambling crimes which have been carried out by the North Sumatra Regional Police Ditreskrimsus Cyber Crime Unit still use the instrument Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 of the ITE Law.*

*The results of the discussion concluded that the obstacles to law enforcement by the Cyber Crime Unit of the Ditreskrimsus Polda, namely criminal sanctions against online gambling based on Article 45 of the ITE Law, are lower than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code. Efforts to overcome these obstacles are the application of the Criminal Code and the ITE Law in online gambling cases. must prioritize the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, hold information technology guidance training.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambling.**

*\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*